

SISTEM MONETER ISLAM: MENUJU KESEJAHTERAAN HAKIKI

Aan Nasrullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula (STAIM) Nganjuk
Email: aan.aljalil@ymail.com

Abstract. The Studies in this article aims to look at how the efforts of the Islamic monetary system in creating the true welfare. Welfare in the conventional economic system (capitalist and socialist) contain of different meanings, when in the conventional economic system, welfare is defined only in terms of materials (material fulfillment), but in the Islamic economic system, welfare contains of broader meaning, the fulfillment of material and immaterial. As Islamic monetary strategy that prohibit sto use of interest, the Islamic monetary instrument does too. The Islamic monetary policy instrument is divided into three mazhab based on the period and the community needs at that time. The first mazhab is the instrument that introduced by mazhab iqtisoduna is Promissory Notes or Bill of Exchange kind of paper to get fresh funds. The second madzhab is the mainstream instruments mazhab that used Dues of Idle Fund is policy instrument that is charged on all assets which are idle. The third mazhab is the alternative monetary system that advocated of Syuratiq Process. It is where a policy that taken by the monetary authorities is based on discussion prior with the real sector. Which is the main characteristic of the Islamic monetary system in its policy instruments are not leaving the ideology of Islamic economics nor throw needs of economic returns for economic players, namely profit sharing. Then it is expected satisfy the human need for material and immaterial, so the true welfare can be achieved.

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya dari sistem moneter Islam dalam menciptakan kesejahteraan hakiki. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) mengandung arti yang berbeda, ketika dalam sistem ekonomi konvensional, kesejahteraan didefinisikan hanya dalam hal materi (pemenuhan kebutuhan materi), namun dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan mengandung makna yang lebih luas, pemenuhan material dan immaterial. Sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, begitu juga

dengan instrumen moneter Islam. Instrumen kebijakan moneter Islam dibagi menjadi tiga mazhab berdasarkan periode dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Instrumen yang diperkenalkan oleh mazhab iqtisoduna adalah Promissory Notes atau Bill Of Exchange semacam surat untuk mendapatkan dana segar. Mazhab kedua adalah mazhab Mainstream instrumen yang digunakan adalah Dues of Idle Fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang idle. Mazhab ketiga mazhab Alternatif sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah Syuratiq Process yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor riil. Yang merupakan ciri utama dari sistem moneter Islam di instrumen kebijakan yang tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam atau membuang kebutuhan pengembalian ekonomi bagi pelaku ekonomi, yaitu bagi hasil. Maka diharapkan memenuhi kebutuhan manusia untuk bahan dan material, sehingga kesejahteraan sejati dapat dicapai.

Kata Kunci: sistem moneter Islam, kesejahteraan hakiki

Pendahuluan

Bila melihat sejarah lahirnya sistem-sistem ekonomi dunia, maka kita akan menemukan suatu kesamaan, yakni semua sistem yang pernah ada mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia pada umumnya. Namun karena setiap sistem yang ada, selalu diwarnai dengan ideologi-ideologi penggagas atau pencetus teori ekonomi tersebut, sebut saja ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam yang masing-masing mempunyai dasar ideologi berbeda. Dasar ideologis inilah yang kemudian menjiwei dari pada komponen sistem ekonomi yakni sumber daya, pelaku serta mekanisme. Pada dasarnya dalam ketiga komponen inilah yang selalu dikaji oleh teori ekonomi yang selalu mengalami evolusi, bagaimana sumber daya itu dikelola, siapa yang menjadi pelaku dalam pengelolaan sumber daya dan mekanismenya seperti apa, semua itu bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia.

Kesejahteraan dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) mengandung arti yang berbeda, bila dalam sistem ekonomi konvensional kesejahteraan hanya diartikan dalam bentuk materi (pemuahan materi), namun dalam sistem ekonomi Islam

kesejahteraan mengandung arti yang lebih luas, yakni pemenuhan materi dan imateri. Hal ini mengingat manusia sebagaimana pada penciptaanya yang terdiri dari dua unsur rohani dan jasmani, maka manusia juga mempunyai dua kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Kedua kebutuhan tersebut berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lain, jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kebutuhan lainnya terganggu.¹

Oleh karena itu, idealnya suatu sistem ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan umum (*general welfare*), dalam ekonomi Islam untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Negara mempunyai peranan penting yakni, Jaminan Sosial, Keseimbangan Sosial dan Intervensi negara.² Jaminan Sosial berarti negara bertanggung jawab atas standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Keseimbangan berarti tidak ada ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan masyarakat dan intervensi pemerintah dilakukan ketika pasar gagal melakukan fungsi utamanya, karena bisa jadi pasar berjalan tidak *fair* akibat pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai sosial (dengan cara curang). Oleh karena itu dalam Islam tidak selamanya urusan ekonomi diserahkan pada pihak swasta semata, ada kalanya pemerintah sebagai pelaku utama, namun tetap dalam prinsip-prinsip kepemilikan pada kepentingan masyarakat luas.

Sistem moneter merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi, dan merupakan penjabaran dari sistem tersebut, begitu juga dengan sistem moneter Islam, merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam.

¹ Luluk Indarinul Mufidah, “Pemberdayaan ekonomi: Suatu Upaya Penanggulangan Radikalisme Terorisme”, dalam *Lentera*, Vol. 14, No. 1 (Nganjuk: STAIM, 2016).

² M. Baqir Ash Sadr, “Our Economic”, terj. Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisoduna* (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), 455.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk menganalisa bagaimana upaya sistem moneter Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pembahasan

Sistem moneter yang mencakup sektor perbankan, pasar modal dan pasar keuangan lainnya, pada dasarnya harus didesain dan diarahkan sedemikian rupa agar benar-benar dapat meningkatkan peranan sektor riil dalam kegiatan ekonomi, sehingga tujuan-tujuan utama dari sebuah sistem ekonomi dapat tercapai, begitu juga dengan sistem moneter Islam, sistem ini diharapkan tidak hanya memperbanyak uang yang beredar, namun bagaimana mampu meningkatkan kinerja sektor riil.

Sasaran Kebijakan Moneter Islam

Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter, pada dasarnya intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang membedakan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam terletak pada mekanisme dan penggunaan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai target moneter. Di mana dalam kebijakan moneter Islam tidak diperkenankan memakai suku bunga dalam instrumennya.

Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosio-ekonomi Islam. Sistem itu juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan

bidangnya yang khusus dan seperti sistem peran lainnya berfungsi.³ Pada dasarnya sasaran (tujuan) kebijakan moneter Islam, akan sangat luas sekali, namun setidaknya-tidaknnya sasaran tersebut antara lain:

- Kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi

Penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai *khalīfah*. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan optimal terhadap sumber-sumber daya adalah sasaran yang substansial, karena menurut Islam semua sumber daya di bumi dan langit diperuntukan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan eksese dan *kemubaziran* untuk dipergunakan bagi tujuan manusia diciptakan. Mereka yang tidak dapat bekerja layak tanpa stigma dan prasangka diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan ke dalam program solidaritas sosial Islam.

Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal harus menjadi tujuan alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas, namun laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menghendaki: 1) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang merusak alam atau dengan *moral hazard*. 2) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok. 3)

³ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.1.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka.

Pertumbuhan ekonomi selayaknya merupakan kontribusi dari sumber daya manusia yang ada, bukan dari orang-perorang atau dari perusahaan tertentu, karena hal ini berkaitan erat dengan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi hanya disumbang oleh sebagian kecil dari penduduk suatu negara, maka distribusi pendapatan juga akan dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, oleh karena itu sasaran yang tidak boleh dilupakan dari sistem moneter Islam adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi disumbang oleh sumber daya manusia yang tersedia, meskipun tidak semua akan mempunyai peran yang sama.

- Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan

Keadilan sosio-ekonomi terwujud ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu sistem moneter Islam, berupaya supaya tidak ada ketimpangan. Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Di antara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi (*tadāwul*) ini diantaranya: 1) Islam mensyariatkan *akad-akad* baik *akad* bisnis (*mu'awwadah*) ataupun *akad* sosial (*tabarru'*) agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain. 2) Islam membolehkan *akad-akad* yang sedikit mengandung gharar seperti *akad* salam sebagai *ruhksah* (keringanan) sehingga harta bisa berpindah kepemilikan dengan *akad-akad* ini. 3) Islam mensyariatkan *akad-akad* yang bersifat *luzūm* tanpa pilihan, kecuali jika disepakati ada syarat dalam *akad*. 4) Islam melarang penimbunan uang, karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan dan sosial. 5) Islam melarang setiap bentuk riba, karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap

sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang. 6) Islam melarang perjudian karena mengurangi bahkan merugikan produksi, sehingga tujuan investasi tidak tercapai, karena harta akan terkonsentrasi pada kegiatan judi.⁴

Pada dasarnya dari keterangan di atas, tujuan terdistribusinya harta adalah supaya peredaran uang tidak hanya beredar pada orang kaya saja, namun juga pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga harta lebih bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

- Stabilitas nilai tukar mata uang

Stabilitas dalam nilai tukar mata uang (nilai kurs) harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Secara praktis bahwa gejolak yang ada pada nilai kurs (nilai tukar mata uang) akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi (jual beli) juga akan terganggu. Dan bila nilai kurs terus menurun maka dampak akhirnya adalah menurunnya pendapatan nasional.

Hal ini dapat terjadi mengingat bahwa nilai kurs juga merupakan alat pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari luar negeri, jika nilai kurs tidak stabil, maka pengusaha akan mendapatkan resiko dari menurunnya nilai kurs, sehingga pengusaha juga akan enggan melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa perdagangan ekspor-impor akan lesu. Seperti yang disampaikan di atas, pada akhirnya pendapatan nasional tidak akan tumbuh signifikan.

Oleh karena itu tugas negara adalah menjaga stabilitas nilai kurs. Untuk memberi kepastian kepada para pengusaha dalam dunia bisnis, terutama di dalam era globalisasi perdangan saat ini,

⁴ Oni Sahroni dan Adi Warman A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2016), h. 72-73.

dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak melakukan kegiatan perdangan dengan negara lain. Disinilah peran dari otoritas moneter untuk selalu menjaga stabilitas nilai kurs.

- Mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian

Sasaran mobilisasi tabungan memang perlu, karena Islam secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. Walaupun demikian tidak semua penabung (penyimpan) menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif. Karena itu ajaran Islam menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir untuk memobilisasi harta yang menganggur (*idle of fund*) dan menyalurkannya secara efektif pada usaha-usah produktif. Institusi demikian harus dilengkapi secara memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan non inflasioner kepada sektor swasta maupun pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran ekonomi. Mengingat lembaga-lembaga ini tidak beroperasi berdasarkan *riba*/bunga, tetapi akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian (bagi hasil), maka perlu diorganisasikan dalam suatu cara yang efisien dan beragam sehingga mampu menghasilkan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada para deposan dan pemegang saham.

- Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan

Sistem keuangan dan perbankan tidak saja harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan mengalokasikannya secara efisien bagi usaha-usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan sektor riil, namun juga mampu mengembangkan pasar uang, primer dan sekunder. Pengembangan pasar uang primer dan sekunder sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya finansial secara efisien. Hadirnya pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi mereka

yang mempergunakannya secara produktif, sedangkan kehadiran pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung dan investor mencairkan investasi mereka mana kala dirasa perlu melakukan hal itu.

Strategi Kebijakan Moneter Islam

Bagaimanapun juga tujuan-tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Di sinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari *syarāh* dan tidak dapat dipisahkan. Elemen terpenting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan-tujuan Islam adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan keduniaan dengan aspek spiritual untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan masyarakat di mana ia hidup. Tanpa peningkatan moral semacam ini tak satupun sasaran akan dapat diwujudkan dan kesejahteraan manusia yang hakiki sulit dicapai. Hal ini memfokuskan perhatian kita kepada konsep kesejahteraan dalam Islam. Kesejahteraan manusia hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia sedemikian rupa, sehingga salah satu dari kedua aspek ini tidak ada yang diabaikan.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa meskipun secara umum tujuan sistem moneter Islam hampir sama dengan sistem moneter ekonomi lainnya yakni, kesejahteraan. Namun pada tataran strategi berbeda jauh, teori ekonomi kapitalis yang mengandalkan kekuatan pasar saja, sedangkan Marxisme mengandalkan negara sebagai pemegang penuh atas kendali aktivitas perekonomian beserta kebijakan-kebijakannya. Dalam Islam individu sebagai *khalīfah* di muka bumi harus mampu bertanggung jawab atas dirinya dan negara sebagai garda terakhir apabila individu itu sudah tidak mampu menjamin kesejahteraannya.

Secara praktis dalam manajemen moneter Islam tidak diperkenankan menggunakan suku bunga, karena sebagaimana dasar

dari sistem ekonomi Islam bahwa riba itu haram, sedangkan suku bunga adalah *ribā*. Oleh karena itu strategi moneter Islam harus menanggalkan suku bunga. Dasar pemikiran dari manajemen moneter Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan-tujuan yang penting dan produktif, sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Dengan kata lain peredaran uang diusahakan dialokasikan kepada sektor riil yang produktif, oleh karena itu dalam Islam tidak ada permintaan uang untuk spekulasi sebagaimana yang dikenal dalam teori Keynes yang mengklasifikasikan permintaan uang menjadi tiga motif, motif untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

Adapun strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang *idle* sehingga mendorong orang untuk melakukan: a) *Qard* (meminjamkan harta kepada orang lain). (b) Penjualan *Muajjal*. (c) *Muḍārabah*.⁵

Para pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan yang memberikan keuntungan besar terbesar (*actual return*), jadi semakin tinggi permintaan uang untuk investasi disektor riil atau kebutuhan akan persediaan dana untuk investasi semakin besar maka, tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan akan relatif menurun. Karena besarnya tingkat *actual return* ini tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga, maka akan menjadikan permintaan uang akan lebih stabil.

Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis, dalam hal ini instrumen moneter Islam, sebagaimana

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam, Edisi Kedua* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 194-196.

strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, maka instrumen moneter Islam juga demikian. Penjelasan mengenai instrumen moneter dalam Islam, akan dijelaskan berdasarkan tiga *mazhab*, yakni mazhab *Iqtiṣādunā*, mazhab mainstream dan mazhab alternatif. perbedaan dari ketiga mazhab ini dapat disebabkan karena masa atau zaman yang berbeda, adapun instrumen yang digunakan dari ketiga mazhab tersebut adalah:

- Mazhab *Iqtiṣāduna*

Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi hampir tidak ada alasan untuk mengubah penawaran dan permintaan uang karena kredit pada waktu itu hanya berlaku di antara pedagang saja. Instrumen moneter yang digunakan adalah *Promissory Notes* atau *Bill Of Exchange*, surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut namun debitor tidak dapat menjual surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk jual beli *negotiable instruments*, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang.

- Mazhab Mainstream

Tujuan dari kebijakan moneter adalah maksimalisasi sumber daya (*resources*) yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Oleh sebab itu mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang (Md) agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam tidak ada permintaan uang (Md) untuk spekulasi.

Motif permintaan uang (Md) dalam Islam ada dua, motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga

(*precautionary motive*), semakin banyak uang yang *idle*, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga (Md_{prec}) semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang *idle*, berbanding terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. *Dues Of Idle Fund* adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang *idle*.

Apabila permintaan uang untuk berjaga-jaga meningkat (Md_{prec}) meningkat, maka usaha yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengembalikan pada titik *equilibrium* adalah dengan cara meningkatkan *dues of idle fund*. Semakin tinggi *dues of idle fund* yang dikenakan terhadap uang yang *idle*, akan menyebabkan masyarakat untuk enggan menyimpan uang yang *idle* tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih suka untuk mengalokasikan uang *idle* tersebut ke sektor ekonomi yang produktif.

- Mazhab Alternatif

Sistem moneter yang dianjurkan oleh *mazhab* ketiga ini adalah *Syuratiq Process* yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor riil. Jadi kebijakan yang ditempuh yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antara sektor moneter dengan sektor riil. Mazhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor riil. Artinya jika terjadi peningkatan kegiatan di sektor riil, dengan ditandainya peningkatan *Agregat Demand* (AD), maka otoritas moneter juga harus menambah jumlah uang beredar (*Money Supply/MS*).

Dengan kata lain sektor moneter tidak boleh meninggalkan sektor riil, harus ada harmonisasi antara kedua sektor tersebut, apa yang terjadi ketika sektor moneter meninggalkan sektor riil (keadaan di mana jumlah uang beredar di masyarakat jauh melampaui kebutuhan untuk kegiatan ekonomi), tidak lain adalah adanya

inflasi. Jika inflasi terjadi apalagi tinggi, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan, bagi konsumen yang pendapatannya tetap, bila terjadi inflasi tentu akan mengurangi daya beli (*Purchasing Power Parity*), selanjutnya dalam tataran makro akan terjadi penurunan *Agregat Demand* (AD), hal ini berdampak luas pada lesunya perekonomian dan pendapatan nasional pun akan terpengaruh negatif. Dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan semakin jauh dari pencapaian.⁶

Dari keterangan-keterangan di atas dapat kita lihat bahwa sistem moneter Islam yang di *breakdown* hingga ke instrumen moneter menunjukkan konsistensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, tidak diskriminatif atau satu pihak saja yang diuntungkan, melainkan semua pihak baik yang memiliki dana maupun yang tidak memiliki dana. Dalam moneter Islam, uang diharapkan berputar pada semua lapisan masyarakat. Tujuannya tak lain adalah agar semua kalangan dapat melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kesejahteraan umum akan dapat dicapai.

Contoh dari konsistensi dari sistem moneter Islam supaya uang bergerak disemua kalangan masyarakat diantaranya:

- a. Adanya zakat *maal* bagi kekayaan yang mencapai *nisab*. Sehingga orang yang mempunyai kekayaan lebih dapat tersalurkan pada orang yang tidak memiliki kekayaan untuk bertransaksi ekonomi.
- b. Adanya pajak bagi harta yang *idle* (tertahan), hal ini juga upaya agar harta berputar di semua kalangan.
- c. Penggunaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam transaksi finansial. Secara garis besar bahwa jika harta dapat

⁶ *Ibid.*, 225-228.

berputar pada semua golongan baik yang miskin maupun yang kaya, maka transaksi ekonomi akan semakin meningkat dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional yang dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan akan menciptakan kesejahteraan umum.

Penutup

Pada dasarnya sistem moneter akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan sistem moneter tersebut, perkembangan sistem moneter dapat dilihat dari perkembangan standar moneter yang digunakan, instrumen moneter, sistem pembayaran sampai pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh otoritas kebijakan moneter. Dan setiap perkembangan sistem moneter akan menghadapi masalah-masalah moneter tertentu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di sektor moneter.

Dari pemaparan tentang sistem moneter Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, tujuan sistem moneter Islam antara lain: kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, stabilitas nilai tukar mata uang, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian serta memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Kedua, tujuan-tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Di sinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Strategi

moneter Islam adalah dengan penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang *idle* sehingga mendorong orang untuk melakukan: *Qard* (meminjamkan harta kepada orang lain), Penjualan *Muajjal*, serta *Mudārabah*.

Ketiga, Instrumen kebijakan moneter Islam terbagi menjadi tiga mazhab berdasarkan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Instrumen yang diperkenalkan oleh mazhab *iqtiṣāduna* adalah *Promissory Notes* atau *Bill Of Exchange* semacam surat untuk mendapatkan dana segar. Mazhab kedua adalah mazhab mainstream instrumen yang digunakan adalah *Dues of Idle Fund* adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang *idle*. Mazhab ketiga mazhab alternatif sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah *Syuratiq Process* yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor riil.

Yang menjadi ciri khas utama dari sistem moneter Islam adalah dalam instrumen kebijakannya tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan tidak pula menanggalkan kebutuhan akan imbal hasil ekonomi bagi pelaku ekonomi yakni bagi hasil. Yang kemudian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan materi dan immateri, sehingga kesejahteraan hakiki dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Diwany, Tarek al-. *Bunga Bank dan Masalahnya The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, tt.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=387338&val=8523&title=kebijakan%20moneter%20%20berbasis%20prinsip-prinsip%20islam>.

Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islam, Edisi Kedua*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2010.

Mufidah, Luluk Indarinul. "Pemberdayaan ekonomi: Suatu Upaya Penanggulangan Radikalisme Terorisme", dalam *Lentera*, Vol. 14, No. 1. Kertosono: STAIM, 2016.

Sadr (ash), M. Baqir. "*Our Economic*", terj. Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisoduna*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.

Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2016.